



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	8
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 21 Januari 2019
Pukul	:	13.00 WIB – selesai
Acara	:	Membahas Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dan Tahun 2019
Ketua Rapat	:	Ichsan Firdaus/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 20 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Sekjen Kemenkes RI, Drg. Oscar Primadi, MPH beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dibuka pukul 13.40 WIB, maka sesuai Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan dan KB agar dapat meningkatkan penyerapan anggaran DAK Bidang Kesehatan dan KB.

2. Berdasarkan realisasi anggaran TA 2018 terkait rendahnya penyerapan DAK Non Fisik (BOK, Jampersal dan Akreditasi), Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
 - a. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
 - b. Memaksimalkan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.
 - c. Mendukung percepatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan antara lain melalui: pendampingan, workshop, dan survei akreditasi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengalokasikan DAK Bidang Kesehatan dan KB secara proporsional dengan memperhatikan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan RI akan merencanakan untuk mengadakan Rapat Lanjutan terkait evaluasi DAK Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2018 dan Tahun 2019 dalam waktu dekat.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam RDP hari ini paling lambat tanggal 28 Januari 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,

Ttd

ICHSAN FIRDAUS

A-260